



Awasi Rekapitulasi Pilwali



Demi Selamatkan Suara Rakyat

JOGJA- Forum LSM DIJ mengajak segenap elemen masyarakat di Kota Jogja agar proaktif melakukan pengawasan terhadap proses re-

kapitulasi suara Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017.

"Awasi dengan optimal untuk menyelamatkan suara rakyat. Pengawasan itu sebagai langkah yang legal," kata Ketua Forum LSM DIJ Beny Susanto kemarin (19/2).

► Baca *Awasi...* Hal 7



Putusan MK dampaknya luar biasa karena dapat mengubah keadaan atau menganulir kemenangan salah satu pasangan calon. Penyelesaian sengketa melalui MK menjadi cara elegan dan terhormat."

Abdul Halim SH, Pengamat Sosial dan Hukum

Kapolda Pastikan Wilayah DIJ Aman dan Kondusif

■ AWASI...

Sambungan dari hal 1

Rekapitulasi masih berproses. Untuk tingkat KPU Kota Jogja dilaksanakan pada 22-24 Februari. Menurutnya, pengawasan secara optimal akan menghentikan polemik terbuka menyangkut hasil sementara pilwali.

"Jika ada yang keberatan, kumpulkan bukti-bukti, alat, dan keterangan yang sah sebagai bahan sengketa pilwali ke Mahkamah Konstitusi (MK)," sarannya.

Kembali tentang pengawasan,

Beny mengingatkan harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal itu terutama menyangkut perhitungan ulang dan pembukaan kotak suara.

Dia berharap, pilwali tidak hanya menjadi proses elektoral lima tahunan dan pesta demokrasi semata. Lebih penting dari itu adalah proses demokratisasi, penguatan kewargaan, kebangsaan, dan keindonesiasan.

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Hukum Abdul Halim SH menilai, polemik seputar selisih perolehan suara pilwali sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan

yuridis.

Dia menyatakan, bila pasangan nomor urut 1 Imam Priyono-Achmad Fadli menemukan indikasi pelanggaran dan kecurangan sebaiknya menggunakan mekanisme hukum.

"Salurannya sudah tersedia melalui gugatan ke MK," katanya.

Di mata Halim, *legal standing* Imam-Fadli menggugat ke MK cukup memadai. Selain sebagai pasangan calon, selisih suara dalam pilwali tidak sampai 1 persen. "Selisih 0,6 persen berpotensi di bawa ke MK," ujar Halim.

Meski begitu, dia mewanti-

wanti agar sebelum ke MK, segala petunjuk maupun bukti harus diinventarisasi. Temuan-temuan di lapangan akan sangat berarti bila didukung alat bukti yang memadai. Dengan demikian, proses pembuktian di MK dapat dilakukan karena terpenuhinya alat bukti.

Senada dengan Beny, dengan diajukan ke MK, polemik yang selama ini muncul dapat diminimalisasi. Semua pihak harus menerima apapun putusan MK.

Berdasarkan pengalaman, putusan MK terkait sengketa pil-

rah. Ada putusan yang mengharuskan adanya perhitungan suara ulang, atau pembatalan hasil pilkada yang telah ditetapkan KPU. Sifat putusan MK bersifat pertama, final dan mengikat.

"Putusan MK dampaknya luar biasa karena dapat mengubah keadaan atau menganulir kemenangan salah satu pasangan calon. Penyelesaian sengketa melalui MK menjadi cara elegan dan terhormat," ucap Halim.

Pada bagian lain, meski sempat terjadi gejolak sebagai dampak tipisnya perolehan suara antara pasangan calon Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dan Imam Priyono-Achmad Fadli, Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri menyatakan Jogjakarta dalam

keadaan kondusif.

Kendati demikian, demi menjamin situasi keamanan wilayah tetap terjaga kapolda tetap menyalakan sedikitnya 2.500 personel hingga seluruh tahapan pilwali dan pilbup selesai. Atau hingga tahap pelantikan pasangan calon terpilih.

"Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini lancar. Tak ada gangguan yang berarti," klaim Dofiri di sela kegiatan bakti sosial di Mapolres Gunungkidul akhir pekan lalu.

Dikatakan, gejolak permasalahan hanya terjadi di Kecamatan Kraton, Kota Jogja. Itupun sudah berhasil diantisipasi.

Sebagaimana penuturan Gubernur DIJ Hamengku Bu-

wono (HB) X, kapolda juga mengimbau masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam proses pilwali maupun pilbup mengedepankan semangat demokrasi. Setiap persoalan yang muncul harus diharapi dengan kepala dingin. Terlebih, setiap tahapan pemilu selalu ada wadah hukum bagi pihak yang berkeberatan.

Guna mencegah timbulnya konflik horizontal, para kader dan simpatisan partai-partai pendukung paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Jogja maupun Bupati-Wakil Bupati Kulonprogo diminta menahan diri. "Mengenal perhitungan suara resmi nanti yang menetapkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)," tegasnya. (kus/gun/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005